



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN RAYA K.H. ABDUL HALIM NO. 107 MAJALENGKA



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN

Nomor Standar Operasional	000.8.3.3/ SKS .1/Sekret/2026
Tanggal Pembuatan	31 Juli 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Agustus 2026
Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  IKIN ASIKIN, S.IP., M.I.P., Kp. NIP. 19740323 199803 1 004
Nama Standar Operasional Prosedur	Pengajuan Izin Perceraian

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8 Tahun 1983 jo. SE Kepala BAKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

KETERKAITAN

1. SOP Pengajuan Surat Izin Perceraian ASN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami prosedur dan mekanisme Pengajuan Surat Izin Perceraian ASN
2. Memahami persyaratan untuk Pengajuan Surat Izin Perceraian ASN
3. Mampu mengoperasikan computer
4. Mampu mengoperasikan sistem
5. Menguasai bidang administrasi pegawai

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Alat tulis kantor
4. Pesawat Telepon
5. Mesin Potocopy

PERINGATAN

1. Izin Tidak diberikan karena alasan Isteri mendapat cacat badan/penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut ASN;
3. Tidak memiliki alasan kuat untuk berpisah;
4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika ingin bercerai wajib mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Tanpa izin dianggap pelanggaran disiplin berat;
3. Alasan Perceraian harus jelas dan dapat diterima sesuai dengan regulasi;
4. Jika ASN laki-laki yang menggugat, wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk anak dan mantan istrinya (Kecuali istri berzinah/ melakukan tindakan tercela/ istri meninggalkan suami 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami);
5. Jika perceraian kehendak istri maka ia tidak berhak atas penghasilan dari mantan suami (tidak berlaku jika minta cerai karena suami berselingkuh, KDRT / perbuatan tercela lain).

URAIAN PROSEDUR SOP / *FLOWCHART* PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		ASN	Atasan Langsung	Kepala BKPSDM	Kabid	Pengelola	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ASN Mengajukan permohonan Pengajuan Izin Perceraian						Melengkapi persyaratan usulan	7 hari Kerja	Tersedianya persyaratan Pengajuan Izin Perceraian ASN
2	Klarifikasi dan Mediasi 1. Surat Panggilan 2. Berita Acara Klarifikasi dan Mediasi						Mengecek kelengkapan persyaratan 1. Melakukan panggilan dan mediasi	7 hari Kerja	Tersedianya persyaratan Pengajuan Izin Perceraian ASN
3	OPD memberikan Rekomendasi Pengajuan Izin Perceraian ASN dan mengirimkan Usulan ke BKPSDM						Disposisi Kepala BKPSDM	24 Jam	Disposisi Kepala BKPSDM
4	Klarifikasi dan Mediasi 1. Surat Panggilan 2. Berita Acara Klarifikasi dan Mediasi						Mengecek kelengkapan persyaratan 1. Melakukan panggilan dan mediasi (diberikan waktu untuk mediasi panggilan ke 1 dan panggilan ke 2)	7-30 Hari Kerja	Disetujui atau ditolaknya usulan
5	Membuat draf Pengajuan Izin Perceraian						Draf Pengajuan Izin Perceraian	3 x 24 Jam	Disetujui atau ditolaknya usulan
6	Proses penerbitan Pengajuan Izin Perceraian						Proses penerbitan Pengajuan Izin Perceraian	10 Menit	Draf pencantuman gelar
7	Surat keterangan Izin Perceraian						Surat keterangan Izin Perceraian	10 Menit	Petikan pencantuman gelar